

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya kebutuhan bernegara di dunia, maka semakin meningkatnya interaksi antar negara-negara di dunia untuk bekerjasama. Integrasi dalam bidang ekonomi merupakan salah satu upaya kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Integrasi dalam bidang ekonomi tersebut ialah pembentukan sebuah *Free Trade Agreements* (FTAs) atau sebuah perjanjian perdagangan bebas.

Pembentukan APEC merupakan salah satu fenomena integrasi yang berkembang di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2004 APEC *Business Advisory Council's* (ABAC) mengusulkan pembahasan mengenai FTAAP (*Free Trade Area of the Asia Pacific*). Namun FTAAP tidak berjalan dengan baik, maka dari itu beberapa negara anggota APEC berencana untuk membuat sebuah perjanjian perdagangan. Negara-negara tersebut dikenal dengan nama P4 atau *Pacific Four* antara lain Chili, Selandia Baru, Brunei Darusalam, dan Singapura. Setelah melakukan berbagai negosiasi akhirnya pada tahun 2005 P4 mencapai sebuah kesepakatan dan membentuk perjanjian *Trans Pacific Strategic*

Economic Partnership (TPSEP). TPSEP diumumkan pada 3 Juni 2005 pada pertemuan APEC di Jeju, Korea Selatan.¹

Trans-Pacific Partnership atau TPP sendiri merupakan kelanjutan dari perjanjian TPSEP, dimana terdapat beberapa negara yang menjadi anggota baru seperti Amerika Serikat, Australia, Peru dan Vietnam. Peralihan TPSEP menjadi TPP terjadi pada tahun 2008 yang merupakan gabungan negara-negara TPSEP dan beberapa negara APEC.² Perjanjian *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPP) atau kemitraan Trans Pasifik secara garis besar merupakan suatu konsep perdagangan bebas dalam sektor barang, jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran perdagangan.³

Saat ini ada 12 negara yang bergabung menjadi anggota *Trans-Pacific Partnership* diantaranya yaitu Selandia Baru, Chili, Brunai Darussalam, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Jepang, Kanada dan Meksiko. Indonesia merupakan salah satu negara yang dibujuk oleh Amerika Serikat untuk bergabung dalam forum TPP tersebut. Amerika Serikat berkomitmen penuh dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam hal stabilitas keamanan. Amerika Serikat memandang bahwa negara-negara khususnya di Asia Pasifik sebagai mitra kerja penting. Hal inilah yang mendasari

¹Puput Marta Binati, "Kepentingan Amerika Serikat dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP)", (eJournal Ilmu Hubungan Internasional FISIP-unmul Volume 4, Nomor 2, 2016: 429-440) hlm 430,

²Ibid, hlm 430

³Eva Marzrieva "*Kemitraan Trans Pasifik, Fokus Utama Forum APEC di Bali*", (Voice of America 2013), Tersedia di: <<http://www.voaindonesia.com/content/tpp-fokus-utama-forum-apec-di-bali/1748844.html>> [Diakses 24 Maret 2016 pukul 14:30]

Amerika Serikat memimpin negosiasi perluasan keanggotaan TPP. Meskipun TPP masih dalam proses negosiasi namun Amerika Serikat telah memperlihatkan komitmennya terhadap perluasan TPP, dengan melakukan berbagai upaya atau usaha untuk memperluas TPP terutama pada periode 2011-2013.

Tahun 2010 merupakan perputaran pertama negosiasi TPP yang diadakan di Melbourne. Perputaran pertama tersebut dihadiri oleh tujuh negara anggota antara lain Amerika Serikat, Chile, New Zealand, Peru, Singapura, dan Australia sementara Vietnam berpartisipasi sebagai pengamat. Pertemuan ini mengutamakan adanya pendekatan institusional yang baru pada bidang-bidang seperti barang, jasa, investasi, atau hak kekayaan properti.

Jika terwujud TPP akan menjadi organisasi perdagangan bebas regional terbesar karena mewakili 36,26 persen PDB dunia. TPP sama halnya dengan organisasi perdagangan lainnya, TPP bertujuan untuk memperkecil hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah investasi, mempromosikan investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja. Namun konsekuensinya, praktik proteksionisme harus dihapuskan dan tidak ada keistimewaan bagi perusahaan milik negara (BUMN).⁴

⁴ Humphrey Wangke, "Kesiapan Indonesia Menjadi anggota Trans-Pasific Partnership", (Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VII, No. 21/1/P3DI/November/2015) hlm.5-6
berkas.dpr.go.id

Pada tanggal 26 Oktober 2015 presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat untuk menemuui Presiden Barack Obama. Dalam pertemuannya di Gedung Putih, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan Indonesia siap dan ingin bergabung dengan blok perdagangan bebas kemitraan *Trans-Pasific (Trans-Pasific Partnership)*.⁵ Ketertarikan Indonesia ingin bergabung ke dalam *Trans-Pasific Partnership* karena ada beberapa pertimbangan yaitu ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang terbuka. Dengan penduduk yang begitu banyak, Indonesia hadir sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia dipercaya menjadi anggota kelompok 20 (G-20) berkat produk domestik bruto senilai US\$ 1 triliun.⁶ Dengan bergabungnya kedalam TPP, Indonesia akan memiliki peluang mengembangkan pasar ke negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Terhadap TPP, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih rumit. Tidak seperti kesepakatan perdagangan bebas lainnya, TPP mencakup bukan hanya perdagangan barang, jasa, dan investasi, tetapi juga aspek lainnya dari perdagangan, seperti penyelesaian sengketa dagang, perburuhan, dan lingkungan. Untuk sektor perdagangan barang, TPP menuntut penghapusan sekitar 11 ribu tarif dagang termasuk beberapa produk pertanian yang sensitif, seperti beras, gandum, gula, dan daging.

⁵ BBC, "Jokowi kemukakan niat gabung Kemitraan Trans-Pasifik", 27 Oktober 2015., tersedia http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151027_indonesia_jokowi_obama_tpp, [Diakses pada 30 Maret 2016, pukul 19.43]

⁶Humphrey Wangke, Op.cit., 2015, hlm 5-6.

Untuk sektor jasa, TPP mencakup sektor perbankan, asuransi, konstruksi, logistik, dan pariwisata. Untuk investasi, TPP mencakup repatriasi modal dan transfer modal, kompensasi yang jujur, dan kandungan lokal (local content).

Ada beberapa ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia apabila bergabung dalam TPP, diantaranya kesulitan Indonesia dalam mempertahankan ekspor, kesulitan beacukai dalam melaksanakan tugas kepabeannya, benefit yang tidak bisa diperkirakan, produk lokal jadi tergerus oleh produk luar, dan juga terganggunya regulasi (beresiko mengubah perundang-undangan mengenai perdagangan).⁷ *Trans Pasific Partnership* (TPP) juga diindikasikan memiliki aspek liberalisasi yang sangat dalam dan luas. Sehingga dampak langsung jika Indonesia mengikuti *Trans-Pasific Partnership* (TPP) antara lain harus dapat menyetujui provisi yang menganakemaskan negara berkembang dalam konten produksi maupun kerjasama teknologi. Dalam hal ini penulis mencoba untuk memaparkan secara deskriptif terkait kepentingan Indonesia ingin bergabung menjadi anggota *Trans-Pasific Partnership* (TPP).

⁷Inriani Margaretha Sitohang, "Penolakan Indonesia Bergabung dalam *Trans-Pasific Partnership*", (eJournal Ilmu Hubungan Internasional 2014, 2 (2) : 313 – 328), hlm. 318, tersedia <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/> [Diakses pada 28 Maret 2016, pukul 19.43]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

“Mengapa Indonesia ingin bergabung menjadi anggota Trans-Pacific Partnership?”

C. Kerangka Berpikir

1. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.⁸

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan

⁸Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D. , “Politik Luar Negeri”, (pustaka UNPAD) hlm 1, tersedia http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf [diakses pada 29 oktober 2016 pukul 18:41]

gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (foreign). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara.⁹

Politik luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Karenanya politik luar negeri dapat juga diartikan sebagai strategi yang atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau aktor hubungan internasional lain.

Setiap negara mempunyai tujuan nasional yang diperoleh dengan mengelola potensi sumber daya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam upaya mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional yang berasal dari sumber daya yang terdapat di luar wilayah negaranya, amat penting bagi setiap negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Dalam menjalankan hubungan itu, setiap negara memiliki politik luar negeri, sebagai kumpulan keputusan yang diambil dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional suatu negara.¹⁰

Kondisi-kondisi tertentu yang ada didalam negeri menjadi faktor terbentuknya kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk ikut serta dalam *Trans-Pasific Partnership* (TPP). Kondisi domestik tersebut terdiri

⁹ Ibid, hlm 1-2

¹⁰Wawolangi, “*Soft Power dalam Politik Luar Negeri Indonesia*”, (FISIP UI, 2010) . Tersedia <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132946-T+27791-Politik+luar-Tinjauan+literatur.pdf>, [Diakses pada 29 Oktober 2016, pukul 19.11]

dari kondisi politik ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang menjadi potensi untuk memposisikan Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya. Kemudian kepentingan domestik yang dimiliki oleh Indonesia itu menjadikan Indonesia berkesempatan untuk berkompetisi dalam kancah intrnasional seperti yang ada didalam teori sistem dunia.

2. *World System Theory*

Teori sistem dunia lahir pertama kali di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970-an, teori ini merupakan lanjutan dari perdebatan antara penganut teori modernisasi dan pembangunan pertumbuhan yang mendapat kritik dari teori dependensia Amerika Latin. Immanuel Wallertein ialah pemikir pertama kali yang menjelaskan teori sistem dunia.¹¹ Sistem ekonomi-kapitalis dunia ini merupakan rumusan teori dari perspektif alternatif perubahan sosial. Immanuel Wallerstein mengembangkan sistem dunia ekonomi-kapitalis dunia banyak meminjam analisis teori dependensia,¹²

Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi, Immanuel Wallerstein memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh Negara di dunia tanpa kecuali. Sehingga, integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik. Dimana ada dua atau lebih

¹¹ Mansour Fakih, *"Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi"* (INSITST PRESS, PUSTAKA PELAJAR, Cetakan II, Oktober 2002, PP.2002.19), Hlm. 138

¹² Ibid, hlm. 139

Negara interdependensi yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan seperti food, fuel, and protection. Juga, terdapat satu atau dua persaingan politik untuk mendominasi yang dilakukan untuk menghindari hanya ada satu Negara sentral yang muncul ke permukaan selamanya.¹³

Menurut Wallerstein jika dunia hanya dibagi dalam dua bentuk negara, masih banyak negara yang belum masuk kedalam 2 kategori tersebut. Maka menurut Wallerstein sistem dunia yang kapitalis dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu, negara sentral, negara semi-periferi, dan negara periferi (pinggiran). Munculnya negara semi pinggiran oleh Wallerstein dikarenakan pemikiran jika hanya terdapat 2 kutub di dunia yaitu Negara sentral dan pinggiran saja, maka disintegrasi akan muncul dengan mudah dalam sistem dunia itu. Sehingga, negara semi pinggiran dinilai akan menghindari disintegrasi tersebut. Kemudian, negara semi pinggiran juga dinilai bisa menjadi iklim ekonomi baru. Para pemilik modal bisa memindahkan modalnya dari tempat yang sudah tidak lagi efisien ke tempat baru yang sedang tumbuh. Hal ini terjadi karena di negara sentral yang sebelumnya merupakan ekonomi unggul mengalami penurunan atau kehilangan keuntungan biaya komparatif sebagai akibat meningkatnya upah yang terus menerus karena eksploitasi buruh di negara-negara pinggiran.

Perbedaan inti dari ketiga kategori adalah kekuatan ekonomi, politik dan militer dari masing-masing kategori negara.

¹³Siswanto Daim, "*Teori Sistem Dunia (World System Theory)*", Tersedia https://www.academia.edu/6708759/Teori_Sistem_Dunia_World_System_Theory [Diakses pada 29 Maret 2016 pukul 20.10]

Pengukuran dari peredaan ekonomi negara core, semi pinggiran dan negara pinggiran di ukur dengan GDP perkapita sementara kekuatan politik di ukur sebagai kekuatan militer¹⁴

a. Negara Inti (core)

Merupakan negara yang maju secara pendapatan ekonomi, teknologi dan produksi yang lebih bervariasi dan berjumlah yang besar. Negara core merupakan negara super power yang dapat dikatakan maju dalam semua aspek kehidupan.

b. Semi Phery-phery

Merupakan kategori negara-negara yang secara ekonomi merupakan negara yang berada di antara phery-phery dan core. Negara semi phery-phery dapat dikategorikan diantara keduanya, jika negara miskin hanya dapat menghasilkan bahan baku sedangkan negara semi phery-phery ini sudah lebih maju mampu mengolah bahan baku menjadi bahan yang setengah jadi dan tentunya kembali diekspor ke negara core untuk diolah.

c. Phery-phery

Merupakan kategori negara yang perekonomiannya rendah, kemajuan teknologi masih minim, produksi yang dilakukan cenderung sederhana. Phery-phery merupakan kategory negara yang tergolong miskin dan aspek negaranya pun jauh dari teknologi canggih, negara phery-phery biasanya memiliki bahan baku untuk memproduksi suatu barang namun tidak dapat mengolahnya menjadi barang jadi karena keterbatasan teknologi dan

¹⁴Edward L. Kick 1987. World-System Structure, National Development, and the Prospects for a Socialist World Order. In Terry Boswell, and Albert Bergesen (eds.), *America's Changing Role in the world-system*, pp. 127-155. New York: Praeger.

biasanya negara phery-phery akan mengekspor bahan baku tersebut kepada negara maju dan kembali mengimpornya kedalam negara dalam bentuk barang jadi namun dengan harga yang tinggi.

Penekanan pada teori ini adalah peralihan kekuatan negara sangat dinamis. Negara sentral bisa menjadi negara semi pinggiran, negara semi pinggiran bisa menjadi negara sentral dan negara pinggiran, sedangkan negara pinggiran bisa menjadi negara semi pinggiran. Jadi sistem kapitalis membentuk dunia yang sangat dinamis.

Seperti halnya Indonesia ingin bergabung ke dalam forum TPP bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negaranya . Mengingat kembali bahwa Indonesia merupakan negara yang masih berkembang. Melalui bergabungnya ke dalam TPP Indonesia mampu mengubah posisinya yang dari negara berkembang atau semi preferi menuju ke negara maju atau sentral.

Kemudian Wallerstein menawarkan strategi yang dapat dilakukan oleh negara dunia ke III untuk dapat “naik kelas” diantaranya ialah:

1. Kenaikan kelas terjadi dengan memenangkan dan memanfaatkan kesempatan. Hal ini terjadi karena dinamika sistem perekonomian dunia, pada suatu harga komoditi primer akan menjadi murah sekali, dan barang-barang industri menjadi mahal, maka negara pinggiran berani mengambil tindakan untuk melakukan industrilisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat menaikkan posisi kelasnya dari negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran.

2. Kenaikan kelas terjadi karena mendundung. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang karena berbagai alasan. Dari sini negara berkembang bisa menarik investor asing agar mau berinvestasi. Akibat dari perkembangan ini, munculah industri-industri di negara pinggiran, yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerjasama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi semi pinggiran. Tetapi dalam hal ini, peran negara menjadi sangat vital karena institusi yang bernama negara yang mampu melakukan koordinasi dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil domestik yang pada umumnya memiliki modal, tenaga ahli dan wilayah pemasaran produksi terbatas.
3. Strategi berdikari. Negara menjalankan kebijakan internal untuk memandirikan perekonomiannya sendiri dan terbebas dari dominasi negara pusat. Salah satu kebijakan internal tersebut dapat berupa politik dumping atau proteksi atas produk-produk industri dalam negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Proteksi ini juga menuntut perlindungan dari sisi kebijakan ekonomi yang merupakan otoritas pemerintah negara pinggiran dan pasokan modal yang juga harus diberikan untuk mampu meningkatkan industri tersebut menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing dengan industri luar negeri lainnya.

Selain itu, pemerintahan negara pinggiran juga harus mulai menyiapkan tenaga ahli dalam negeri untuk pada saatnya nanti mereka dapat mengembangkan teknologi industri domestik.¹⁵

Perubahan juga terjadi dari semi pinggiran ke negara sentral. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan kesempatan pasar dan memperluas jaringan pasar. Usaha ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari aneksasi wilayah lain, menaikkan harga impor, dengan menaikkan kuota dan tarif pada barang impor ataupun dengan melakukan subsidi, menekan upah buruh, menaikkan daya beli riil masyarakat, serta memanipulasi selera konsumen dengan promosi dan bahkan ideologi.¹⁶

Dalam hal ini Indonesia menggunakan strategi kenaikan kelas yang ditawarkan oleh Wallerstein yaitu kenaikan kelas terjadi karena Indonesia ingin memperluas jaringan pasar. Dengan masuknya Indonesia kedalam forum TPP akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu Indonesia dapat menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, meningkatkan ekspor Indonesia dan memberikan kemudahan dalam masuknya barang dan jasa ke dalam negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

¹⁵Mansour Fakih, Op.cit., 2002, hlm 140

¹⁶Ibi hlm.141

D. Hipotesa

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan sementara bahwa Indonesia berkeinginan bergabung ke dalam forum *Trans-Pasific Partnership* karena:

1. Indonesia ingin meningkatkan perekonomian domestik.
2. Indonesian ingin memperluas jaringan pasar agar dapat meningkatkan posisi kelasnya seperti yang dijelaskan Wallerstein dalam *World System Theory*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana pengumpulan data dan fakta penulis menggunakan analisis muatan dengan penjelasan sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan dari buku pustaka, makalah ilmiah, jurnal, internet, berita online, majalah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang nantinya akan dibahas.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota *Trans-Pasific Partnership*(TPP).

G. Jangkauan Penelitian

Sebagai usaha agar skripsi ini tetap fokus terhadap tema yang telah ditetapkan maka pembatasan ruang lingkup masalah sangatlah penting untuk dilakukan. Pembatasan ruang lingkup masalah yang dilakukan diharapkan dapat mempersempit area penulisan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat fokus dengan masalah yang diteliti pada skripsi ini.

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas maka perlu dibatasi penulisan. Oleh karena itu data penulisan dalam penelitian ini yaitu dari sebelum terbentuk *Trans Pasific Partnership* hingga tahun 2015- 2016.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi berjudul **“KEPENTINGAN INDONESIA INGIN BERGABUNG MENJADI ANGGOTA TRANS-PASIFIC PARTNERSHIP”** maka sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bab yang akan diuraikan lebih dalam yang terdiri dari :

Bab I, pada *Bab pertama* akan memaparkan mengenai bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang berisikan asal muasal permasalahan agar kita memahaminya secara jelas. Kemudian rumusan masalah yang berisi kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat. Untuk membedah permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya maka diambil sebuah teori atau konsep yang akan disajikan dalam kerangka teori , sehingga dapat ditarik sebuah hipotesa. Selanjutnya

metode penulisan agar dapat mengetahui bagaimana penulis mendapat data yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II, pada *Bab kedua* akan memaparkan Politik Luar Negeri Indonesia dalam isu *Free Trade Agreement*

Bab III, pada *Bab ketiga* menjelaskan sejarah *Trans Pasifik Partnership*

Bab IV, pada Bab keempat akan menjelaskan tentang Faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia bergabung menjadi anggota *Trans Pasifik Partnership*.

Bab V, pada *Bab kelima* merupakan akhir dari pembahasan yang akan memaparkan mengenai Kesimpulan dari apa yang telah dikaji dari bab-bab sebelumnya